

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Chidir, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, Refika Opset, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arimbi, Horoeopetri, dan Santosa, 2012, *Peranan Pembangunan*, PT. Binakarsa, Jakarta.
- Chaizi, Nasucha, 2005, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Devos, Ken, *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*, 2013, London.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia R., 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Kencana, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta.
- Harahap, S. Sofyan, 2004, *Sistem Pengawasan Manajemen cet. II*, Pustaka Quantum, Jakarta.
- Horoeopetri, A., Achmad S., 2003, *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, Walhi, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- Johan, Bahder, 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang.
- Kurniawan, Darmadi, 2015, *The Power of "Blusukan"*, Media Komputindo, Jakarta.
- Mustaqiem, 2014, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Litera, Yogyakarta.
- Nurdin, A. dan Ahmad Abrori, 2006, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, UIN Jakarta Press, Jakarta.
- Nurmantu, Safri, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.
- , 2010, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Andi, Yogyakarta.
- Moekijat, 1998, *Analisis Jabatan*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2008, *Administrasi Perkantoran*, Mandar Maju, Bandung.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2005, *Hukum Pajak*, Ekonisia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Sri, 2008, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Terbaru*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Pandiangan, Liberti, 2008, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*, Elex Komputindo, Jakarta.
- Rahman, Abdul, 2010, *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*, Nuansa, Bandung.
- Saidi, Muh. Djafar, 2013, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2008, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Setiawan, M. Adi, 2018, *Pendekatan-Pendekatan Konseling: Teori dan Aplikasi*, CV Budi Utama, Sleman.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010, *Hukum Pajak Elementer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Seri Peraturan Perpajakan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak, 2017, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Peresada, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1988, *Pajak dan Pembangunan Edisi Kedua Cetakan ke-3*, Eresco, Bandung.
- Soemitro, Rochmat, dan Dewi Kania Sugiharti, 2010, *Asas dan Dasar Perpajakan 1 Edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung.
- Suandy, Erly, 2016, *Hukum Pajak Edisi 7*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung.
- Wahyuni, Sri dan Rifki Khoirudin, 2020, *Pengantar Manajemen Aset*, CV Nas Media Pustaka, Makassar.
- Waluyo, 2008, *Akuntansi Pajak (ed.1)*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wirawan B. Ilyas, Waluyo, 2003, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Widodo, D., D. Djefris, & E. A. Wardhani, 2010, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, Alfabeta, Bandung.
- Wiradipradja, Saefullah, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung.
- Zain, M., 2007, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Lampiran I Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak dengan Menggunakan Aplikasi *Approweb*, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, Nomor SE-49/PJ/2016 tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi.
- Lampiran II Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak dengan Menggunakan Aplikasi *Approweb*, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, Nomor SE-49/PJ/2016 tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 13 A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 526).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79 /PMK.01/2015 tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 561).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1894).

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* (AR) Pada Kantor Pelayanan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 561).

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pasal 43 ayat (4) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Artikel Jurnal

Agustin, Artika Wulan, Darmansyah, dan Suyanto, “Kepatuhan, Pemeriksaan, Penagihan, dan Penerimaan Terhadap Pajak dengan Peran Account Representative sebagai Pemoderasi”, JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan), Universitas Pancasila, Jakarta, Vol. 7, No. 1, Juni, 2020.

Astuti, T. dan I. Panjaitan, “Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi”, *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Anies Said M. Basalamah, Jefry Harysandy, Adi Budiarto, dan Taufikurrahman, “Pemisahan Fungsi AR (*Account Representative*) untuk Pelayanan dan Penerimaan Pajak yang Lebih Baik”, *Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan*, Vol. 20, No. 1, April 2016.

Denziana, A. dan H. Sutanto, “Pengaruh Peran Account Representative Terhadap Tingkat Kepatuhan”, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 6, No. 1, 2015.

- Ferdiana, Diki dan Ayu Chairina Laksmi, "Pengaruh Proses Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Serta Kepuasan Dan Kepatuhan Dalam Wajib Pajak Pribadi Kabupaten Sleman Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 24, No. 3, Desember 2018.
- Hanna, E., dan Firnanti F., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Auditor*, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 15, No. 1, 2013.
- Iqbal, Syaiful dan Mahfud Sholihin, "*The Role of Cognitive Moral Development in Tax Compliance Decision Making: An analysis of the synergistic and antagonistic tax climate*", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. 35, No. 2, 2019, pp. 227-241.
- Jatirahayu, Warih, "*Kearifan Lokal Jawa sebagai Basis Karakter Kepemimpinan*", *Diklus*, Edisi XVII, No. 01, September 2013.
- Laksmi, Nimas Ayu Putri dan Cholichul Hadi, "*Hubungan Antara Konflik Peran Ganda (Work Family Conflict) dengan Kepuasan Kerja pada Karyawan bagian Produksi, PT. X*", *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Airlangga*, Vol. 1, No. 2, Juni 2012.
- Misra, Fauzan, *Tax Compliance, Theories, Research Development and Tax Enforcement Models*, *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, Departement of Accounting Faculty of Economics Universitas Andalas, Vol. 03, No. 02, 2019, pg. 189-204
- Muturi dan Kiarie, *Effect of Online Tax System on Tax Compliance Among Small Taxpayers in Meru Country, Kenya*, *International Journal of Economics, Commerce and Management*, United Kingdom, Vol. III, No. 12, 2015.
- Nugrahanto, Arif dan Sucitha Hidayati, "*Apakah Pemeriksaan Sudah Membuat Wajib Pajak Gentar*", *Jurusan Perpajakan Politeknik Keuangan Negara STAN, Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Jakarta, 2018.
- Ortax, Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative (AR)* pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern, <https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=10516>, diakses pada tanggal 25 September 2020.
- Parsaulian, Baginda, "*Impelementasi Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI) di Indonesia*", *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 6, No. 1, 2019, pp.
- Perdana, Kurniawan Wira, "*Studi Pemisahan Tugas dan Fungsi Account Representative (AR) Pengawasan dan Konsultasi Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*", *Jurnal Arthavidya*, Vol. 20, No. 1, 2018.
- Prasetyo, Agus, Pujiyono, dan Nabitatus Sa'adah, "*Praktik Penyidikan terhadap Wajib Pajak yang melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I*", *Diponergoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.
- Rachmawati, An'nissa Dwi, Djamhur Hamid, dan Maria Goretti Wi Endang N.P., "*Pengaruh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Kepanjen)*", *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Vol. 2, No. 1, 2014.

- Safrina, Noor, Julkawait dan Nurul Qalbiah, 2018, *Account Representative “Dua Kaki yang Berdiri di Dua Perahu” dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara)*, Jurnal INTEKNA, Politeknik Negeri Banjarmasin, Vol. 18, No. 2, Nov 2018, pg. 667-131
- Selvi, “Implementasi Perubahan Kedua Kebijakan Pengampunan Pajak terkait Pengungkapan Pajak Terkait Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final Wajib Pajak Badan KPP Madya Jakarta Barat”, Jurnal Transparansi, Vol. 2, No. 1, Juni 2019.
- Supriyadi, dkk., *Evaluasi Lembaga Keberatan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak yang Adil di Direktorat Jenderal Pajak*, Jurnal Pajak Indonesia, Vol.2., 2018.
- Supriyadi, *Automatic Exchange of Information sebagai Sarana Meningkatkan Empat Pilar Kepatuhan Pajak*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jurnal Reformasi Administrasi, Vol. 6, No. 2, September 2019.
- Tampubolon, K. P. B. dan D. Pratomo, “Pengaruh Account Representative dan Pengetahuan Wajib Pajak Badan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. *Journal of E-Proceeding of Management*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Tlieb, Benjamin H. Got, *Social Support Strategies: Guidelines for Mental Health Practieces Sage Journal: Health and Education Behaviour*, Vol. 7, No. 4, 1983.
- Tommy, Surya Effendy dan Agus Arianto Toly, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Pertamabahan Nilai”, Jurnal Tax and Accounting Review, Vol. 1, No. 1, 2013, pg.
- Waghe, Alter S., Sifrid Pangemanan, dan Sonny Pangerapan, “Analisis Kinerja Account Representative (Ar) dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Manado”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 13, No. 4, 2018.
- Widianingsih, Yayuk, “Model Pendidikan dan Pelatihan Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I”, Universitas Airlangga Library Purwarupa Repository, 2017.
- Yasa, I Wayan Murdana, “Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Mediasi Stres Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar Bali”, Jagadhita: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14, No. 1, 2017.
- Zuharroh, Anggita Gayuh Novi, Laporan Magang, “Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Pihak KPP Pratama Yogyakarta”, 2018.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Anggraini, Rima A., 2016, *Evaluasi Pelaksanaan Tugas (Account Representative (AR) Dalam Sistem Modernisasi Perpajakan Kantor Pajak Pratama (Studi Kasus di Kantor Pajak Pratama Pasar Rebo Jakarta)*, Skripsi, Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, 2016, *Road Map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2015-2019*, Hasil Penelitian, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Jakarta.

- Firdaus, Afif Sarwoni, 2019, Skripsi "Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus pada KPP Pratama Pamekasan)", Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya.
- Gaflomi, Johanis, 2009, Skripsi, *Fungsi Account Representative (AR) dalam Sistem Administrasi Modern (SAM) Perpajakan di Wilayah Kerja KPP Pratama Bantul*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Prasetyo, Dita Karisma, 2019, Skripsi, *Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Investasi Cryptocurrency di Indonesia Ditinjau dari Atas Kemudahan Administrasi*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nugroho, Panji, Tesis, 2020, "Komunikasi Pemerintah dalam Penyuluhan Perpajakan (Studi Kasus pada Program Business Development Services (BDS) di KPP Pratama Surakarta tahun 2018-2019, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Safarina, Hamida Amri, 2018, Skripsi, "Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".
- Samsul, Hidayat, 2017, Skripsi, *Kesiapan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dalam Mengadopsi Automatic Exchange of Information (AEOI)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yohannah, Esther, 2012, Skripsi, *Tinjauan atas Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja Account Representative dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pademangan)*, Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.

Makalah/Pidato

- Nurmantu, Safri dan Mas Rasmini, "Dasar-Dasar Perpajakan", *Makalah*, Kuliah Umum Universitas Terbuka, Jakarta, 2014.

Internet

- Deni, "36.763 Jadi Wajib Pajak Baru di DIY" <https://www.starjogja.com/2018/12/17/wajib-pajak/>, diakses pada tanggal 23 September 2020.
- Direktorat Jenderal Pajak, "Kepatuhan Meningkat, Penyampaian SPT Tumbuh Double Digit", <https://www.pajak.go.id/kepatuhan-meningkat-penyampaian-spt-tumbuh-double-digit>, diakses 5 Mei 2020.
- Direktorat Jenderal Pajak, "Reformasi Perpajakan Jilid III Masih Terus Berlanjut", <http://www.pajak.go.id/id/artikel/reformasi-perpajakan-jilid-iii-terus-berlanjut>, diakses pada tanggal 23 November 2020.
- Direktorat Jenderal Pajak, Harta (Yang Perlu Dilaporkan Dalam) SPT Tahunan, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/harta-yang-perlu-dilaporkan-dalam-spt-tahunan>, diakses pada tanggal 23 November 2020.
- Direktorat Jenderal Pajak, Frequently Asked Questions Common Reporting Standart (CRS), dalam rangka Implementasi UU Nomor 9 Tahun 2017 beserta aturan

- pelaksanaannya, Maret 2018, https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/FAQ_AEOI_-_Perjanjian_Internasional.pdf, diakses pada tanggal 30 Januari 2021.
- DDTC Peraturan Pajak, <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/keputusan-dirjen-pajak-kep-13pj2014>, diakses pada tanggal 28 September 2020.
- Dwi R., Annissa, Djamur Hamid, dan Maria Goretti Wi Endnag N.P., "Pengaruh *Account Representative* (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Kepanjen), PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, <https://media.neliti.com/media/publications/192725-ID-pengaruh-account-representative-ar-terha.pdf>, diakses pada tanggal 6 Juli 2020.
- Pajakku, "Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007, https://www.pajakku.com/tax-guide/6977/KEP_DIRJEN_PJK/KEP-141/PJ/2007, diakses pada tanggal 23 September 2020.
- Pemerintah Kabupaten Sleman-Wilayah Administratif, <http://www.slemankab.go.id/wilayah-administratif>, diakses pada tanggal 23 September 2020.
- K, Dwi Rachmad dan Widyaishwara, Kemenkeu Learning Center (KLC), Ultimum Remedium dalam Ketentuan Perpajakan, <https://klc.kemenkeu.go.id/ultimum-remedium-dalam-ketentuan-perpajakan/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, "Membangun ZI menuju WBK, <https://www.youtube.com/watch?v=VACiuwW5aH4>, diakses pada tanggal 25 September 2020.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "APBN Kita", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/>, diakses pada tanggal 7 Mei 2020.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/keputusan-direktur-jenderal-pajak-kep-75pj2020-:~:text=Seksi Pengawasan dan Konsultasi II mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran,Wajib Pajak Strategis, melakukan pengumpulan>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021.
- Laporan Kinerja 2016 Direktorat Jenderal Pajak, https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-04/LAKIN_DJP_2016.pdf, diakses pada tanggal 28 September 2020.
- Mardlo, Zidni Amalia, Reformasi Perpajakan Jilid III Terus Berlangsung, <http://www.pajak.go.id/id/artikel/reformasi-perpajakan-jilid-iii-terus-berlanjut>, diakses pada 23 November 2020Santoso, Yusuf Imam, "Tingkat Kepatuhan Pajak Naik, Cuma Masih di Bawah Target", <https://nasional.kontan.co.id/news/tingkat-kepatuhan-pajak-naik-cuma-masih-di-bawah-target?page=all>, diakses 2 Mei 2020.
- Setiawan, Doni Agus, DDTC News, Reportase kebijakan Publik, "Perluasan Basis Pajak, DJP Bakal Gunakan Dua Pendekatan Ini", Oktober 2020, <https://news.ddtc.co.id/perluas-basis-pajak-djp-bakal-gunakan-dua-pendekatan-ini-24904>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2020.

- Sitarasmi, Endah, Direktorat Jenderal Pajak, “Lumbung Data itu Bernama DIP (Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/lumbung-data-itu-bernama-dip>, diakses pada tanggal 20 April 2021.
- Susanto, Herry, Artikel Pajak Nasional Direktorat Jenderal Pajak, *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak> diakses pada tanggal 26 Maret 2021.
- Utomo, Suryo, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, 2018, “Tax Amnesty Keadilan atau Kepentingan”, Jakarta, <https://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-TAX-AMNESTY-KEADILAN-ATAU-KEPENTINGAN-1465876077.pdf>, diakses pada tanggal 28 Desember 2020.
- Online Pajak, *Ini Sanksinya Jika Anda Tidak Melakukan Pembayaran Pajak; Mengenal Sanksi Pajak di Indonesia*, <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/sanksi-tidak-melakukan-pembayaran-pajak>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
- Wibisono, Aditya, Kepala Seksi Kerjasama dan Humas Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, “Sinergi DJP-DJBC Sebagai Strategi Pengamanan Penerimaan Negara”, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/sinergi-djp-djbc-sebagai-strategi-pengamanan-penerimaan-negara/-::~:~:text=DJP juga menggandeng DJBC sebagai,yang berada di kawasan berikat>, diakses pada tanggal 28 April 2021.
- Yuliana, Siska, DDTC Consulting Review: *Seri Tax Control Framework*, “Proses Bisnis dan Manajemen Data dalam pengelolaan Risiko Pajak”, https://news.ddtc.co.id/proses-bisnis-dan-manajemen-data-dalam-pengelolaan-risiko-pajak-21094?page_y=1146, diakses pada tanggal 23 April 2021.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.